



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P. RENJA)
TAHUN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD), adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perubahan rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil OPD sesuai Peraturan Gubernur nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Rencana pelaksanaan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu dan dari evaluasi tersebut dapat direncanakan antisipasi terhadap pelaksanaan program di masa yang akan datang agar dapat disusun secara terpadu guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan SKPD dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Tahap penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selaras dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 7);
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 30).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menetapkan dokumen perubahan perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, Sedangkan tujuannya adalah menyusun perubahan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta untuk mengetahui :

1. Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
2. Perubahan Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
3. Perubahan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
4. Perubahan Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
5. Perubahan Pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
2. Mengevaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan semester II Tahun 2021.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun sebelumnya.
4. Perumusan perubahan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
5. Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) 2021 adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD
- 3.3. Prigram dan Kegiatan

BAB. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Pagu Anggaran Untuk Program dan Kegiatan
- 4.3 Program dan Kegiatan Prioritas

BAB. V. P e n u t u p

B A B I I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2021

Untuk menjaga konsistensi terhadap capaian target kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan dan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan perlu dilakukan review terhadap realisasi Renja PD sampai dengan triwulan II tahun 2021 yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan bila dibandingkan dengan Renstra dan prakiraan capaian kinerja pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) tahun berjalan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran terlebih dahulu perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan salah satu sarana untuk mengukur pengeluaran belanja dengan kinerja yang dihasilkan atau yang disebut dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dan terukur dalam penyusunan anggaran yang dilakukan suatu organisasi sektor publik dengan menggunakan indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Triwulan II Tahun 2021 dilaksanakan setelah bulan Juni. Hasil dari evaluasi menjadi acuan untuk relisasi penyerapan pada triwulan berikutnya.

Pagu Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 2.406.884.069.818,00 dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.593.150.412.944,00 atau 66,19% terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Povinsi

Pagu program sebesar Rp. 29.715.425.459,00 dan realisasi program sebesar Rp. 9.968.274.354,00 atau 33,55%.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pagu program sebesar Rp. 2.369.178.271.268,00 dan realisasi program sebesar Rp. 1.582.630.076.586,00 atau 66,80%.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pagu program sebesar Rp. 7.990.373.091,00 dan realisasi program sebesar Rp. 552.062.004,00 atau 6,91%.

Adapun capaian dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan triwulan II Tahun 2021 antara lain sebagaimana pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel. 2.1. (Format I.G)
EVALUASI HASIL RENJA OPD TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (TAHUN N-1)	TARGET KINERJA DAN RENJA TAHUN 2021 (TAHUN N)		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2021 (TAHUN N)				CAPAIAN TARGET RENSTRA s/d TRIWULAN II TAHUN 2021 (TAHUN N)			
								REALISASI KINERJA RENJA		REALISASI I TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)		REALISASI TARGET		REALISASI TINGKAT CAPAIAN TARGET (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)		9=5+7		10= 9/4	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	Keuangan														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	98	%		98	%	52	%	1	%	52	%	53	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	98	%		98	%	58	%	59	%	58	%	59	%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen		2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	33	%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA yang disusun	3	dokumen		1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA yang disusun	3	dokumen		1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah DPA yang disusun	6	dokumen		2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	33	%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	3	Dokume n		1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	3	dokumen		1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihilangkan	12	Dokumen	4	dokumen	2	dokumen	50	%	2	dokumen	17	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	98	%	98	%	57	%	58	%	57	%	58	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	300	%	100	%	50	%	50	%	50	%	17	%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi yang tersedia	130	Item	40	Item	20	item	50	%	20	item	15	%
	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bukti pengeluaran yang diverifikasi	400	Dokumen	100	dokumen	55	dokumen	55	%	55	dokumen	14	%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	36	Kali	12	Kali	6	kali	50	%	6	kali	17	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang dihasilkan	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah	98	%	98	%	100	%	102	%	100	%	102	%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	98	%	98	%	68	%	70	%	68	%	70	%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah	351	Orang	117	orang	56	orang	48	%	56	orang	16	%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	351	Orang	117	orang	80	orang	69	%	80	orang	23	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	98	%	98	%	40	%	41	%	40	%	41	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	135	Buah	35	buah	25	buah	71	%	25	buah	19	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	125	Buah	45	buah	35	buah	78	%	35	buah	28	%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	120	Buah	20	Item	10	item	50	%	10	item	8	%
	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bahan logistik yang disediakan	351	Orang	117	orang	45	orang	38	%	45	orang	13	%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	140	Item	40	Item	35	item	88	%	35	item	25	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	50	Item	10	Item	5	item	50	%	5	item	10	%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	270	Tamu	90	Tamu	40	tamu	44	%	40	tamu	15	%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam	275	Kali	75	Kali	37	kali	49	%	37	kali	13	%

		dan luar daerah																	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	60	Dokumen	20	dokumen	10	dokumen	50	%	10	dokumen	17	%					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	60	Buah	20	Item	10	item	50	%	10	item	17	%					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	98	%	98	%	70	%	70	%	70	%	71	%					
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dibeli	351	Item	117	Item	117	item	100	%	117	item	33	%					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98	%	98	%	43	%	44	%	43	%	44	%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola	9.600	Buah	3200	buah	1.600	buah	50	%	1.600	buah	17	%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	9	Jenis	3	jenis	1	jenis	33	%	1	jenis	11	%					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	450	Unit	150	Unit	70	unit	47	%	70	unit	16	%					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	14	Jenis	4	jenis	2	jenis	50	%	2	jenis	14	%					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	98	%	98	%	42	%	43	%	42	%	43	%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	21	Unit	7	Unit	5	unit	71	%	5	unit	24	%					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	51	Unit	17	Unit	12	unit	71	%	12	unit	24	%					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/rehab	3	Unit	1	Unit	0	unit	0	%	0	unit	0	%					
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	98	%	98	%	65	%	66	%	65	%	66	%					
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	98	%	98	%	31	%	31	%	31	%	31	%					
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	6	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	6	dokumen	2	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%					
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	117	dokumen	39	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%					

	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	117	dokumen	39	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	117	dokumen	39	dokumen	39	dokumen	100	%	39	dokumen	33	%
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	117	dokumen	39	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD	24	dokumen	8	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	27	dokumen	9	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	98	%	98	%	60	%	61	%	60	%	61	%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	99	dokumen	33	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	99	dokumen	33	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	99	dokumen	33	dokumen	33	dokumen	100	%	33	dokumen	33	%
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	99	dokumen	33	dokumen	33	dokumen	100	%	33	dokumen	33	%
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	300	Orang	100	orang	66	orang	66	%	66	orang	22	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	98	%	98	%	65	%	66	%	65	%	66	%
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	18	BUMD	6	BUMD	6	BUMD	100	%	6	BUMD	33	%

	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	36	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	50	%	6	dokumen	17	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	42	dokumen	14	dokumen	7	dokumen	50	%	7	dokumen	17	%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah BA Rekonsiliasi dengan instansi terkait	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	12	dokumen	4	dokumen	2	dokumen	50	%	2	dokumen	17	%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	98	%	98	%	85	%	87	%	85	%	87	%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya rekonsiliasi dan verifikasi	36	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	50	%	6	dokumen	17	%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	33	%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	33	%
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sisdu yang dihasilkan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%

	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah partisipan yang hadir	300	orang	100	orang	100	orang	100	%	100	orang	33	%
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	98	%	98	%	100	%	102	%	100	%	102	%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	33	%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan pengelolaan dana bagi hasil	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	%	1	Laporan	33	%
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	98	%	98	%	100	%	102	%	100	%	102	%
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Laporan pengelolaan data APBD dengan aplikasi SIPD	3	Dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	98	%	98	%	85	%	87	%	85	%	87	%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	98	%	98	%	85	%	87	%	85	%	87	%
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	%	1	dokumen	33	%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	6	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	100	%	2	dokumen	33	%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	147	dokumen	49	dokumen	49	dokumen	100	%	49	dokumen	33	%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	%	0	dokumen	0	%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	147	OPD	49	OPD	49	OPD	100	%	49	OPD	33	%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	144	SK	49	SK	49	SK	100	%	49	SK	34	%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	147	dokumen	49	dokumen	30	dokumen	61	%	30	dokumen	20	%

	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	147	dokumen		49	dokumen	49	dokumen	100	%	49	dokumen	33	%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	99	kab/kota		33	kab/kota	0	kab/kota	0	%	0	kab/kota	0	%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan aplikasi pada PT. Bank Sumut dan seluruh Perangkat Daerah sebagai pengelola penerimaan sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah yang akurat pada setiap saat atau secara real time.
2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi Cash Manajemen System (CMS) Kas Daerah yang digunakan untuk pembayaran SP2D dan aplikasi Cash Manajemen System (CMS) Non SP2D yang digunakan untuk pembayaran yang dilakukan Bendaharan Pengeluaran.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan PD sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset) Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Hambatan utama pada penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga operator dari luar.
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan triwulan II Tahun 2021 pada **Tabel 2.2** dan Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada **Tabel. 2.3 (Tabel T-C.30)**. antara lain yaitu :

TABEL 2.2

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	TARGET	CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan peraturan Perundang-undangan	1.	Tersedianya Dokumen Anggaran Tepat Waktu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	$\frac{\text{(Jumlah Dok. APBD yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. APBD yang harus tersedia)}} \times 100\%$	100%	0%
			2.	Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%	$\frac{\text{(Jumlah OPD penyerapan min.90\%)}}{\text{(Jumlah seluruh OPD)}} \times 100\%$	100%	0%
			3.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provsu tepat waktu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	$\frac{\text{(Jumlah Dok. Pertanggungjawaban yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Pertanggungjawaban yang harus tersedia)}} \times 100\%$	100%	100%
2.	Mewujudkan penataan dan pengelolaan asset yang berkualitas	BMD dikelola dengan baik	4.	Pengelolaan BMD yang lebih baik dan tersedianya laporan BMD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan data asset daerah sesuai SAP - Aplikasi Simbada berbasis online - Jumlah tanah yang bersertifikat 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - Update aplikasi Simbada Online - 43,93% 	<ul style="list-style-type: none"> - 50% - Update aplikasi Simbada Online - 25.64%
3.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kab/Kota	5.	Persentase SK Gubsu yang selesai tentang APBD dan P.APBD Kab/Kota serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota tepat waktu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/kota)}} \times 100\%$	100%	0%
					$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang P.APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$	100%	0%
					$\frac{\text{(Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota)}}{\text{(Jumlah Kab/Kota)}} \times 100\%$	100%	0,06%

Tabel 2.3 (Tabel T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD
Provinsi Sumatera Utara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Realisasi 2021 sd tw.2	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tersusunnya dokumen anggaran pemprovsu			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	-	tepat waktu	tepat waktu	
2	Terlaksananya penerbitan SP2D			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
3	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksananya pembuatan Surat Keputusan pengelola keuangan dan barang milik daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Tersusunnya dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	
6	Tersusunnya dokumen laporan barang milik daerah pemprovsu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
7	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada umumnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat terlaksana dengan baik. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sesuai Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang APBD Provsu TA. 2021 dan Pergubsu No. 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA. 2021. Namun dilakukan Pergeseran Anggaran I dengan Pergubsu Nomor 6 Tahun 2021.

Adapun kendala-kendala untuk kegiatan-kegiatan disebabkan pelaksanaan pergeseran APBD yang telah dilakukan yaitu Pergeseran I dan kondisi Pandemi Covid-19. Mekanisme kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik atas setiap kegiatan. Begitu juga dengan koordinasi antar bidang lebih ditingkatkan. Selain itu, perlu juga diadakan pelatihan / bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung kelancaran kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu. Koordinasi antar instansi/Perangkat Daerah (PD) dan Pemerintah Kabupaten / Kota baik dalam hal pengumpulan data dan lainnya, untuk lebih ditingkatkan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah Provinsi Sumatera Utara untuk perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2020 tidak melakukan pengumpulan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai unsur penunjang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B I I I

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provsu mempunyai kaitan yang erat dimana tugas pokok dan fungsi harus mendukung Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya adalah :

Agenda Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.	1. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2. Meningkatkan Partisipasi Publik
Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	1. Mencegah dan memberantas korupsi
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	2. Penguatan sektor keuangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah dapat menjadi penguatan sektor keuangan.

Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Tujuan, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan Perubahan Rencana Kerja-BPKAD yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

- a. Memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang ;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi serta sinergitas antar SKPD, Pemerintahan Daerah maupun Pemerintah Pusat ;
- d. Meningkatkan komunikasi dan pengembangan data serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembiayaan yang didanai dari DAU.

Sasaran, adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program kegiatan dan pengelolaan APBD ;
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipatif, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka Perubahan Rencana Kerja (P. Renja) Tahun 2021, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Mempunyai 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan.
- b. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
Mempunyai 6 kegiatan dan 34 sub kegiatan.
- c. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Mempunyai 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

I. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu merupakan salah satu Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset.

Tugas Pokok Badan adalah berkaitan dengan Keuangan dan Aset yaitu :

“Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.”

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu menyelenggarakan fungsi :

- b. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset;
- c. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Tahun Anggaran 2021 menganggarkan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Mempunyai pagu sebelumnya sebesar Rp. 29.715.425.459,- dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 11.814.400.576,- dengan 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan.
- b. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**
Mempunyai pagu sebelumnya sebesar Rp. 2.430.022.557.905,- dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 2.681.671.773.458,- dengan 6 kegiatan dan 34 sub kegiatan.
- c. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Mempunyai pagu sebelumnya sebesar Rp. 7.990.373.091,- dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 9.804.530.091 dengan 1 kegiatan dan 13 sub kegiatan.

4.2 Pagu Anggaran Untuk Program dan Kegiatan

Untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dialokasi anggaran dana yang akan tertuang dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Adapun Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai pada **Lampiran Tabel 4.1.**

4.3 Program Dan Kegiatan Prioritas

Adapun anggaran program dan kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah seperti **Tabel 4.2** dibawah ini :

TABEL 4.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS		INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1		2	3	4
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah KUA dan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen : KUA dan PPAS	721.426.000,-
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	2 Dokumen : KUA dan PPAS	732.729.500,-
3	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	41 Dokumen Berita Acara	334.394.000,-
4	Koordinasi, Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	41 Dokumen Berita Acara	639.428.400,-
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	41 Dokumen Berita Acara	140.797.700,-
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	41 Dokumen Berita Acara	355.219.700,-
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD	2 Dokumen :Perda dan Pergub	2.006.566.000,-
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen :Perda dan Pergub	2.651.638.300,-
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	738.747.450,-
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	100 %	741.445.600,-
3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2 Dokumen	427.966.000,-

	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	
1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	49 Dokumen Berita Acara	279.597.000,-
2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	49 Dokumen Berita Acara	171.883.000,-
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	49 Dokumen Berita Acara	1.076.169.161,-
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	49 Dokumen Berita Acara	4.247.473.700,-
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	
1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	33 Dokumen	802.445.700,-
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	33 Dokumen	457.137.500,-
3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	33 Dokumen	545.297.000,-

B A B V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan untuk perubahan terhadap komponen maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja (P.Renja).

Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan.

Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (P. Renja) BPKAD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

1. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
3. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
4. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
5. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

B. Rekomendasi.

Dengan tersusunnya Renja-BPKAD ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Perubahan Renja (P.Renja) Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Medan,

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730824 199203 1 001**

Lampiran : Tabel 4.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tokol Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	2				KEUANGAN										2,467,728,356,455	2,727,222,364,408			2,727,222,364,408			
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan layanan administrasi			Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%								PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			11,814,400,576
5	2	1	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%			1 OPD	1 OPD			224,450,000	224,450,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			224,450,000
5	2	1	1.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	1 OPD	1 OPD			86,450,000	86,450,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			86,450,000
5	2	1	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah RKA yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan RKA yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah DPA yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Perubahan DPA yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Laporan Evaluasi Yang Dihadirkan	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	1 OPD	1 OPD			23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,000,000
5	2	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi	Kota Medan, Medan Polonia, Madras Hulu	100%	100%			1 OPD	1 OPD			19,037,075,383	23,931,660,283	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			23,931,660,283
5	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Administrasi gaji dan tunjangan yang terlaksana	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100%	100%	1 OPD	1 OPD			17,576,463,383	17,011,048,283	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			17,011,048,283
5	2	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terlaksana	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	40 item	40 item	1 OPD	1 OPD			13,956,000	13,956,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			13,956,000
5	2	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Pengujian/verifikasi yang dilaksanakan	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100 dokumen	100 dokumen	1 OPD	1 OPD			1,196,280,000	6,656,280,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			6,656,280,000

5	2	1	1.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Koordinasi Pelaksanaan akuntansi yang terlaksana	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 kali	12 kali	1 OPD	1 OPD	23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				23,000,000
5	2	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 OPD	1 OPD	23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				23,000,000
5	2	1	1.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 OPD	1 OPD	23,000,000	23,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				23,000,000
5	2	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 OPD	1 OPD	161,076,000	161,076,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				161,076,000
5	2	1	1.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan prognosis realisasi Medan, Sumatera Utara yang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 OPD	1 OPD	20,300,000	20,300,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				20,300,000
5	2	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	190,400,000	190,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				190,400,000
5	2	1	1.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Laporan penatausahaan BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 OPD	1 OPD	190,400,000	190,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				190,400,000
5	2	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	481,736,000	481,736,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				481,736,000
5	2	1	1.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang diolah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	117 ASN	117 ASN	1 OPD	1 OPD	194,200,000	194,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				194,200,000
5	2	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	117 ASN	117 ASN	1 OPD	1 OPD	287,536,000	287,536,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				287,536,000
5	2	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	4,164,644,976	4,380,696,476	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				4,380,696,476
5	2	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	35 buah	35 buah	1 OPD	1 OPD	115,214,000	115,214,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				115,214,000
5	2	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	45 buah	45 buah	1 OPD	1 OPD	743,381,376	959,432,876	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				959,432,876

5	2	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 item	20 item	1 OPD	1 OPD	261,985,600	261,985,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					261,985,600
5	2	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	117 orang	117 orang	1 OPD	1 OPD	728,133,000	728,133,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					728,133,000
5	2	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	40 item	40 item	1 OPD	1 OPD	300,056,000	300,056,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					300,056,000
5	2	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 item	10 item	1 OPD	1 OPD	79,760,000	79,760,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					79,760,000
5	2	1	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	90 tamu	90 tamu	1 OPD	1 OPD	68,000,000	68,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					68,000,000
5	2	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi yang dilakukan dalam dan luar daerah	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	75 kali	75 kali	1 OPD	1 OPD	1,383,615,000	1,383,615,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					1,383,615,000
5	2	1	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 dokumen	20 dokumen	1 OPD	1 OPD	35,500,000	35,500,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					35,500,000
5	2	1	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah sarana/fasilitas yang disediakan untuk SPBE	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 item	20 item	1 OPD	1 OPD	449,000,000	449,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					449,000,000
5	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	623,770,000	623,770,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					623,770,000
5	2	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah Pengadaan Mebeleur Yang Dilaksanakan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	117 item	117 item	1 OPD	1 OPD	623,770,000	623,770,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					623,770,000
5	2	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	4,149,261,600	4,969,261,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					4,969,261,600
5	2	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah surat, dokumen dan paket yang dikirim atau dikelola	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3200 buah	3200 buah	1 OPD	1 OPD	150,000,000	150,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					150,000,000
5	2	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Rekening jasa sumber daya yang dibayarkan setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 jenis	3 jenis	1 OPD	1 OPD	894,061,600	994,061,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					994,061,600

5	2	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	150 unit	150 unit	1 OPD	1 OPD	300,000,000	300,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					300,000,000
5	2	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah pelayanan umum kantor yang dibayar setiap bulan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 jenis	4 jenis	1 OPD	1 OPD	2,805,200,000	3,525,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					3,525,200,000
5	2	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi		Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			1 OPD	1 OPD	844,087,500	944,086,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					944,086,500
5	2	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	7 unit	7 unit	1 OPD	1 OPD	277,995,000	377,994,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					377,994,000
5	2	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	17 unit	17 unit	1 OPD	1 OPD	367,550,000	367,550,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					367,550,000
5	2	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	Jumlah dan luas gedung kantor dan bangunan yang dipelihara/reha	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tupoksi BPKAD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 unit	1 unit	1 OPD	1 OPD	198,542,500	198,542,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					198,542,500
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%					2,430,022,557,905	2,681,671,773,458	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					2,681,671,773,458
5	2	2	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			49 OPD	49 OPD	8,748,813,350	8,204,905,350	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					8,204,905,350
5	2	2	1.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah KUA yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	49 OPD	49 OPD	818,954,000	721,426,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					721,426,000
5	2	2	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun tepat waktu	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	49 OPD	49 OPD	787,261,500	732,729,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					732,729,500

5	2	2	1.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	39 dokumen	39 dokumen	49 OPD	49 OPD	334,394,000	334,394,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					334,394,000
5	2	2	1.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	39 dokumen	39 dokumen	49 OPD	49 OPD	639,428,400	639,428,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					639,428,400
5	2	2	1.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	39 dokumen	39 dokumen	49 OPD	49 OPD	140,797,700	140,797,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					140,797,700
5	2	2	1.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Berita Acara Review Perubahan DPA-SKPD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	39 dokumen	39 dokumen	49 OPD	49 OPD	355,219,700	355,219,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					355,219,700
5	2	2	1.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	8 dokumen	8 dokumen	49 OPD	49 OPD	2,154,241,000	2,006,566,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					2,006,566,000
5	2	2	1.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	9 dokumen	9 dokumen	49 OPD	49 OPD	2,980,111,300	2,651,638,300	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					2,651,638,300

5	2	2	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	175,437,500	180,387,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					180,387,500
5	2	2	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	179,094,625	217,044,625	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					217,044,625
5	2	2	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penganggaran keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	183,873,625	225,273,625	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					225,273,625
5	2	2	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	2,299,928,700	2,460,561,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					2,460,561,700
5	2	2	1.02	2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	33 dokumen	33 dokumen	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	802,445,700	802,445,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					802,445,700
5	2	2	1.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan ranperkada tentang Perubahan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	33 dokumen	33 dokumen	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	457,137,500	457,137,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					457,137,500

5	2	2	1.02	4	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	SK Gubsu tentang hasil evaluasi ranperda dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	33 dokumen	33 dokumen	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	545,297,000	545,297,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				545,297,000
5	2	2	1.02	5	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah asistensi yang dilakukan pada setiap kab/kota se-Sumut	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	33 dokumen	33 dokumen	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	102,170,000	102,170,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				102,170,000
5	2	2	1.02	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah ASN yang menghadiri sosialisasi	Meningkatnya kemampuan kab/kota dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100 orang	100 Orang	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	392,878,500	553,511,500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				553,511,500
5	2	2	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			49 OPD	49 OPD	2,239,164,000	2,668,304,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,668,304,000
5	2	2	1.03	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pemahaman SDM terhadap penggunaan aplikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	108,300,000	578,700,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				578,700,000
5	2	2	1.03	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya penatausahaan pembiayaan daerah	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	6 BUMD	6 BUMD	49 OPD	49 OPD	54,400,000	54,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				54,400,000

5	2	2	1.03	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan dana perimbangan dan dana transfer	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	49 OPD	49 OPD	266,000,000	350,100,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					350,100,000
5	2	2	1.03	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas, terlaksananya rekonsiliasi penyetoran pajak pusat ke RKUN	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	14 dokumen	14 dokumen	49 OPD	49 OPD	611,984,000	600,284,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					600,284,000
5	2	2	1.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya analisis piutang dan utang Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	54,900,000	54,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					54,900,000
5	2	2	1.03	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Draf Dokumen Penerimaan & Pengeluaran Kas Atas SP2D	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	755,380,000	719,720,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					719,720,000
5	2	2	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya regulasi atas pengelolaan keuangan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 dokumen	4 dokumen	49 OPD	49 OPD	388,200,000	310,200,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					310,200,000
5	2	2	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			49 OPD	49 OPD	2,752,028,200	2,798,714,950	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					2,798,714,950

5	2	2	1.04	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya rekonsiliasi dan verifikasi	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	49 OPD	49 OPD	153,663,950	136,663,900	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					136,663,900
5	2	2	1.04	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	49 OPD	49 OPD	720,050,000	738,747,450	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					738,747,450
5	2	2	1.04	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas LKPD sesuai dengan SAP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	742,913,500	741,445,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					741,445,600
5	2	2	1.04	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan pergub tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 dokumen	2 dokumen	49 OPD	49 OPD	430,684,000	427,966,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					427,966,000
5	2	2	1.04	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	49 OPD	49 OPD	0	345,400,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					345,400,000
5	2	2	1.04	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya dokumen analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	171,324,000	171,324,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					171,324,000
5	2	2	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya SOP	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	242,928,000	237,168,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					237,168,000

5	2	2	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah partisipan yang hadir	Meningkatnya kemampuan OPD dalam menyusun LKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	100 orang	100 orang	49 OPD	49 OPD	290,464,750	0					0
5	2	2	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			49 OPD	49 OPD	2,412,211,916,455	2,663,347,826,808	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,663,347,826,808
5	2	2	1.05	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 laporan	1 laporan	49 OPD	49 OPD	75,000,000,000	26,012,755,853	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				26,012,755,853
5	2	2	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil	Persentase pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 laporan	1 laporan	49 OPD	49 OPD	2,337,211,916,455	2,637,335,070,955	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,637,335,070,955
5	2	2	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%			49 OPD	49 OPD	1,770,707,200	2,191,460,650	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,191,460,650
5	2	2	1.06	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola data keuangan daerah dengan SIPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	49 OPD	49 OPD	1,770,707,200	2,191,460,650	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				2,191,460,650
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah				100%	100%					7,990,373,091	9,804,530,091	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				9,804,530,091
5	2	3	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah		Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku		100%	100%			49 OPD	49 OPD	7,990,373,091	9,804,530,091	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				9,804,530,091
5	2	3	1.01	1	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar harga yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	49 OPD	49 OPD	400,062,660	453,788,660	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)				453,788,660

5	2	3	1.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen standar BMD dan standar kebutuhan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	49 OPD	49 OPD	399,964,690	398,372,690	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					398,372,690
5	2	3	1.01	3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen RKBMD yang disusun	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 dokumen	49 dokumen	49 OPD	49 OPD	318,508,570	318,508,570	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					318,508,570
5	2	3	1.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan BMD	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	49 OPD	49 OPD	246,940,610	246,940,610	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					246,940,610
5	2	3	1.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	1,076,169,161	1,076,169,161	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					1,076,169,161
5	2	3	1.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD yang melakukan inventarisasi BMD sesuai ketentuan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	338,813,000	338,813,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					338,813,000
5	2	3	1.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan perlindungan keamanan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	2,681,887,700	4,247,473,700	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					4,247,473,700
5	2	3	1.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BMD yang mendapatkan penilaian	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	609,758,260	809,758,260	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					809,758,260
5	2	3	1.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah OPD Pemprov yang mematuhi Permendagri No 108 Tahun 2016	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 OPD	49 OPD	49 OPD	49 OPD	258,783,000	256,909,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)					256,909,000

5	2	3	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah SK BMD Yang Dioptimalisasikan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 SK	49 SK	49 OPD	49 OPD	1,028,311,940	1,028,311,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,028,311,940
5	2	3	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah BA rekonsiliasi BMD yang dihasilkan	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 dokumen	49 dokumen	49 OPD	49 OPD	279,597,000	279,597,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				279,597,000
5	2	3	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah laporan BMD OPD Pemprov	Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	49 dokumen	49 dokumen	49 OPD	49 OPD	173,572,000	171,883,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				171,883,000
5	2	3	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	Jumlah kabupaten/kota yang menerima pembinaan	Meningkatnya kemampuan kabupaten/kota dalam mengelola BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	33 kab/kota	33 kab/kota	49 OPD	49 OPD	178,004,500	178,004,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				178,004,500
TOTAL																2,467,728,356,455	2,727,222,364,408					2,727,222,364,408